



MASYARAKAT DIMINTA TAATI PROKES

Kasus Masih Tinggi, PTKM Bisa Diperpanjang

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin serta menaati kebijakan yang ada dalam Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Karena kebijakan PTKM yang mulai diberlakukan di DIY (11 - 25 Januari), diharapkan bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi penularan Covid-19. Hal itu akan bisa diwujudkan jika semua pihak bisa menaati kebijakan PTKM dengan baik.

Sebaliknya, jika masyarakat bersikap abai dan tidak mau menegakkan Prokes, tidak menutup kebijakan PTKM akan diperpanjang. "Supaya penularan kasus positif bisa dikurangi dan semuanya harus benar-benar dikontrol. Mulai dari penegakan Prokes di setiap aktivitas yang dilakukan sampai pembatasan jam operasional tempat usaha pada pukul 19.00 WIB. Kita harus disiplinkan betul, dengan harapan kondisi semakin baik sehingga tidak diperpanjang

(PTKM)," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Senin (18/1).

Sultan mengungkapkan, seandainya setelah adanya kebijakan PTKM kasus Covid-19 tidak mengalami penurunan, ada kemungkinan kebijakan tentang pembatasan aktivitas (PTKM) diperpanjang. Karena kewenangan berkaitan dengan itu ada di pemerintah pusat. Walaupun ada beberapa pihak yang mengusulkan agar kebijakan PTKM tidak

diperpanjang. Untuk itu, Sultan meminta masyarakat bersabar dengan mengikuti aturan pembatasan ketat. Sehingga kasus Covid-19 bisa menurun dan PTKM tidak diperpanjang.

"Saat ini *rekasa* (susah dulu) tidak apa-apa, karena mobilitas dibatasi. Tapi setelah 25 Januari harapan saya kondisinya semakin baik, bukan makin jelek. Kalau makin jelek pasti diperpanjang. Tidak ada logika untuk tidak *diteruske* (diperpanjang)," tegas Sultan.



KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY GKR Mangkubumi menegaskan, pihaknya tidak ingin pelaksanaan PTKM di DIY diperpanjang. Sebab kondisi pelaku usaha maupun pelaku industri di DIY semakin tertekan dengan adanya kebijakan pengetatan dan pembatasan tersebut.

“Kadin DIY tidak henti-hentinya dan tidak capek untuk selalu mengingatkan pelaksanaan dan menjaga proses, karena kami ingin roda ekonomi kembali jalan. Semua pelaku usaha dan industri yang terdampak akan kita diskusikan kembali untuk mengingatkan warga sekitar, paling tidak untuk patuh protokol kesehatan

supaya PTKM tidak diperpanjang lagi di DIY,” tutur GKR Mangkubumi kepada KR di Yogyakarta, Senin (18/1).

Wakil Ketua Umum Kadin DIY Wawan Harmawan mengatakan, PTKM di DIY harus berakhir pada 25 Januari, dengan catatan penerapan proses pencegahan Covid-19 di DIY wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

“Kami akui masih banyak yang enggan dan belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan, jadi harus diwajibkan bukan disarankan lagi. Tidak fair juga kalau kita minta PTKM tidak diperpanjang tetapi protokol kesehatan tidak dijalankan maka pandemi Covid-19 tidak akan berakhir. Virus Korona ini ada dan memang berbahaya, jadi jangan abaikan kesehatan supaya aktivitas ekonomi segera dipulihkan,”

terangnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin DIY Gonang Djulianto mengungkap, pupus sudah harapan pelaku usaha dan industri di DIY bisa bertumbuh pada Januari 2021 ini dengan diberlakukannya PTKM. Kuncinya adalah pengetatan dan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan agar tren penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bisa ditekan.

“Ternyata harapan kami semua pupus seiring dengan kenaikan kasus Covid-19 dan diberlakukannya PTKM, sehingga perekonomian di DIY kembali tertekan. Semua usaha drop, dan supaya ekonomi bisa berjalan lagi maka kuncinya disiplin proses supaya kebijakan PTKM tidak diperpanjang,” pungkas Gonang.

(Ria/Ira)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005